

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M. Dahlan. 2018. *Keberpihakan Media Terhadap Berita Konflik Partai Golkar: Analisis Wacana Kritis*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Assidik, Karunia Gallant dan B. Wahyudi Joko Santoso. 2016. "Citra Publik Presiden Republik Indonesia pada Pemberitaan di Harian Suara Merdeka, Tabloid Tempo, dan Harian Republika Kajian Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough". *Jurnal Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 5 (2). Universitas Negeri Semarang.
- Badara, Aris. 2014. *Analisis Wacana-Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darma, Yoce Aliah. 2014. *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Eriyanto.2003. *Analisis Wacana-Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKis.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. Terjemahan oleh Indah Rohani. Malang: Boyan Publishing.
- _____. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman
- Fairclough, Norman dan Ruth Wodak. 1997. *Critical Discourse Analysis*. In T.A. van Dijk (ed). *Discourse as Social Interaction*. London: Sage.
- Fauzan, Umar. 2014. "Analisis Wacana Kritis dari Model Faiclough hingga Mills." *Jurnal Pendidik*. 6 (1).STAIN Samarinda.
- Hall, Stuart (Ed.). 1997. *Representation: Cultural Representations dan Signifying Practices*. London: Sage Publications.
- Haryatmoko, 2019. *Critical Discourse Analysis*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jorgensen, Marianne W. dan Luise J. Philips. 2010. *Discourse Analysis: Theory and Method*. Diterjemahkan oleh Imam Suyitno, dkk. dengan judul: *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Cet. 5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Maghvira, Genta. 2017. "Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan Tempo.Co tentang Kematian Taruna Stip Jakarta". *Jurnal The Messenger*. 9 (2): 122.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, Asep Saepul. 1999. *Jurnalistik Prndekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Munfarida, Elya. 2014. "Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough" *Komunika*. 8 (1)
- Muslich, Masnur. 2008. *Kekuasaan Media Massa Mengonstruksi Realitas*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Nasir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Santoso, Anang. 2012. *Studi Bahasa Kritis: Menguak Bahasa Membongkar Kuasa*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Setiawan, T., 2014. Ancangan awal praktik analisis wacana kritis. *Diksi*, 2(22).
- Sinar, Tengku Silvana. 2008. *Teori dan Analisis Wacana-Pendekatan Sistemik – Fungsional*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Sobur, Alex. 2015. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Subroto. 1992. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Sudarman, Paryati. 2008. *Menulis di Media Massa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta
- Suntama (2016). *Representasi Komunikasi Politik Jokowi (Analisis Wacana Pemberitaan Blusukan Jokowi di Koran Kompas dan Republika)*. (Tesis). Jakarta (D): Universitas Mercu Buana.

- Taylor, SJ dan R Bogdan. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*, Second Edition. John Wiley and Sons. Toronto.
- Thomas, Linda & Shan Wareing. 1999. *Bahasa, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widyawari, Caecilia Petra Gading May. 2016. *Representasi Ideologi dalam Tuturan Santun Pejabat Negara Pada Talk Show Mata Najwa* (Tesis). Semarang (ID): Universitas Negeri Semarang.
- Wulandari, Yosi. 2012. "Pendayagunaan Struktur Teks Wacana Kesejahteraan Rakyat dalam Tajuk Rencana Harian Kompas". *Jurnal Kajian Linguistik dan Sastra*. 24 (2). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

LAMPIRAN

Lampiran berita 1

Tawarkan Program Baru, Jokowi Janjikan Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memperkenalkan kartu baru yang menjadi program yang ditawarkannya jika kembali terpilih pada Pemilihan Presiden 2019. Sejumlah program itu disampaikan Jokowi dalam pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

Kartu baru yang disebutkan Jokowi adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), dan Kartu Pra-kerja. Jokowi memamerkan satu per satu contoh kartu tersebut saat menyebutnya dalam pidato.

Berikut ini adalah kartu baru yang menjadi program Jokowi:

1. Kartu Sembako Murah

Jokowi pertama kali menunjukkan Kartu Sembako Murah. Kartu ini menjadi pelengkap Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jokowi mengatakan, KIP dibuat untuk menjamin anak Indonesia bisa terus bersekolah tanpa hambatan ekonomi. Sementara, KIS menjamin kesehatan masyarakat dan memastikan mereka tidak jatuh miskin ketika ada anggota keluarga yang sakit. "Tetapi semua hal itu tidak cukup, saya ingin melakukan lebih banyak lagi untuk kesejahteraan rakyat," kata Jokowi

"Maka Program Keluarga Harapan (PKH) akan saya perkuat dengan program Kartu Sembako Murah," tambah dia sambil menunjukkan kartunya. Relawan yang hadir langsung bertepuk tangan dan bersorak.

2. KIP kuliah

Program kedua adalah KIP-Kuliah. Jokowi mengatakan, sudah ada 18,7 juta siswa yang mendapatkan manfaat KIP. Namun, pelajar yang merasakan manfaat KIP hanya sampai tingkat SMA. Jokowi ingin jaminan pendidikan itu bisa dilanjutkan hingga kuliah. Dia pun membuat program baru yaitu KIP-Kuliah. "Kartu Indonesia Pintar yang sekarang hanya sampai di SMA, akan kami jadikan sampai kuliah. Artinya Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini akan

membantu biaya pendidikan. Membantu biaya pendidikan dari anak usia dini hingga kuliah dengan kartu ini," kata dia

3. Kartu Pra-kerja

Jokowi mengatakan, di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, sebenarnya lapangan kerja yang tercipta semakin banyak. Namun, masyarakat juga harus semakin meningkatkan keterampilan mereka. Untuk mendukung itu, kata Jokowi, pemerintah sudah punya berbagai program vokasi. Program vokasi itu akan diperkuat dengan program baru yaitu Kartu Pra-kerja. Kartu ini akan membantu para pencari kerja meningkatkan keterampilan mereka. "Saya akan meluncurkan kartu pra-kerja untuk memberikan layanan pelatihan vokasi. Ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan," ujar Jokowi.

Lampiran berita 2

3 Kartu Baru Jokowi Dinilai untuk Tangkal Serangan Kubu Prabowo

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai, calon presiden petahana Joko Widodo mempunyai alasan khusus dalam memperkenalkan tiga kartu sakti barunya di masa kampanye Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, tiga kartu baru itu yakni Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Pra Kerja, dan Kartu Sembako Murah, bukan semata-mata untuk melengkapi kartu-kartu dan program yang sudah ada. Lebih dari itu, pengenalan tiga kartu tersebut dinilainya untuk menjawab kritik hingga serangan yang kerap disampaikan kubu Prabowo Subianto. "Ini jurus pamungkas yang digunakan paslon 01 untuk membantah semua narasi kubu 02 soal pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan pangan," kata Ujang saat dihubungi, Kamis (28/2/2019)

Menurut Ujang, tiga kartu ini setidaknya dapat mengambil dua ceruk suara pemilih. KIP kuliah dan kartu pra kerja akan dapat menarik perhatian para milenial yang jumlahnya sangat besar pada pilpres kali ini. Sementara, kartu sembako murah bisa menarik simpati dari emak-emak. "Tapi apakah itu akan efektif, tergantung. Karena dalam konteks program incumbent jika dia dikelola dengan baik maka tentu akan ada hasil dampak terhadap elektoral. Begitu pun sebaliknya," ujar Ujang.

Terlepas apakah akan efektif atau tidak untuk menggaet pemilih, Ujang menilai, Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah mulai berani menjanjikan program-program yang konkret kepada masyarakat. Sementara, kubu Prabowo-Sandiaga dinilainya belum mampu membuat program pamungkas seperti milik Jokowi-Ma'ruf.

Menurut dia, kubu Prabowo-Sandi lebih banyak membangun narasi negatif dan sporadis dari isu lama. "Karena narasi yang dikembangkan adalah program yang tidak ada maka serangan itu mudah dipatahkan oleh 01," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Political Review ini.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memperkenalkan kartu baru yang menjadi programnya. Hal ini dia sampaikan dalam pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center, Minggu (24/2/2019). Kartu baru yang disebutkan Jokowi adalah Kerti Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), dan Kartu Pra-kerja.

Lampiran berita 3

Fadli Zon Sebut 3 Program Kartu Jokowi sebagai "Jurus Mabuk"

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyindir program-program baru yang dicetuskan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. Menurut dia, cara ini dipakai karena elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf tidak kunjung mengalami kenaikan jelang Pemilu 2019. "Ini menurut saya adalah jurus mabuk gitu ya. Jurus mabuk karena elektabilitasnya sudah mangkrak sehingga muncul lagi jurus-jurus ini," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Fadli menganggap, program kartu-kartu yang ada sebelumnya banyak yang gagal. Fadli juga menyoroti pemberian tunjangan hari raya (THR) yang dipercepat oleh Jokowi. Menurut dia, ini juga bagian dari jurus mabuk itu. Fadli mengatakan, Jokowi tengah panik sehingga menggunakan segala cara untuk menang. Termasuk menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam kapasitasnya sebagai presiden.

"Sudahlah jangan menghina akal sehat kita bahwa ini adalah cara-cara politik untuk memenangkan pilpres dengan menggunakan segala macam resources yang ada," ujar Fadli. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memperkenalkan kartu baru yang menjadi programnya. Hal ini dia sampaikan dalam pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center, Minggu (24/2/2019). Kartu baru yang disebutkan Jokowi adalah Kerti Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), dan Kartu Pra-kerja.

Lampiran berita 4

BPN Prabowo Nilai Kartu Pra Kerja Jokowi Tak Bagus, Bikin Ketergantungan

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengkritik program Kartu Pra Kerja capres petahana Joko Widodo. Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ledia Hanifa menilai program tersebut bisa membuat ketergantungan karena pemegang kartu tetap digaji meskipun belum mendapat pekerjaan. "Enggak bagus juga. Seharusnya lebih dilatih lebih baik supaya mereka bisa berkembang. Karena kalau enggak, ketergantungannya cukup besar," kata Ledia dalam diskusi di Media Center Prabowo-Sandi di Jakarta, Senin (4/3/2019).

Ledia juga menilai, Kartu Pra-Kerja tidak bisa menyelesaikan permasalahan pengangguran di Indonesia. Menurut dia, salah satu solusi mengatasi pengangguran adalah menyiapkan kurikulum pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan pencari kerja. "Sebetulnya enggak usah ada kartu itu. Yang paling penting bagaimana menyiapkan anak-anaknya. Kalau sudah disiapkan, juga dibuat *link and match* dunia usaha dengan sekolah dan kampus, itu bisa," ujarnya.

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo sebelumnya menyebut pemegang kartu pra kerja akan mendapatkan gaji meski belum mendapatkan pekerjaan. Hal itu disampaikan Jokowi saat ngopi bareng milenial di Kendari, Jumat (1/3/2019).

Menurut Jokowi, para pemegang kartu itu mulanya akan mendapatkan pelatihan sesuai keterampilan dan skill yang mereka miliki. Namun, jika memang setelah pelatihan dilakukan namun pemegang kartu pra kerja tetap belum mendapatkan pekerjaan, maka ia akan mendapat honor dari pemerintah. "Kalau belum dapat pekerjaan, kartu itu juga akan memberikan kayak honor, kayak gaji. Tapi jumlahnya berapa masih kita rahasiakan. Nanti," kata Jokowi

Lampiran berita 5

BPN Prabowo-Sandiaga: Pembuatan 3 Kartu Pasti Jadi Beban Anggaran Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso menuturkan bahwa gagasan satu kartu untuk mengakses seluruh program pemerintah merupakan gagasan alternatif yang ditawarkan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Gagasan alternatif itu sekaligus menjadi kritik terhadap program tiga kartu yang menjadi andalan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurut Priyo, program tiga kartu Jokowi-Ma'ruf berpotensi menjadi beban anggaran negara "Itu adalah alternatif, karena pembikinan kartu-kartu pasti membebani anggaran negara," ujar Priyo dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

Priyo mengatakan, memasuki era digital seperti saat ini pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) untuk mengakses seluruh program pemerintah sangat dimungkinkan. Di sisi lain, kata Priyo, saat debat, Sandiaga optimistis dapat memanfaatkan sistem teknologi *Single Identification Number* yang terdapat dalam e-KTP. "e-KTP ini yang dicoba ditawarkan terhadap hiruk pikuk kubu sebelah dalam menawarkan tiga kartu," kata Sekjen Partai Berkarya itu.

Pada saat debat ketiga pilpres, Minggu (17/3/2019), calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin memamerkan tiga kartu yang akan menjadi program andalannya bersama calon presiden Joko Widodo. Ke-tiga kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja. Namun program tersebut mendapat kritik dari rival debatnya Sandiaga Uno. Ia menilai, penggunaan banyak kartu untuk mengakses berbagai program pemerintah justru akan menjadi beban bagi masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, Sandiaga enggan mengeluarkan program berbasis kartu apabila terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Sandiaga, e-KTP dapat menjadi konsolidator semua program pemerintah. Artinya masyarakat hanya perlu e-KTP untuk mengakses program-program pemerintah. Dari mulai akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga rumah murah. "Jadi cukup membawa

kartu tersebut ke fasilitas pemerintah untuk mendapatkan layanan," kata Sandiaga. "Bagi kami, kita sudah menghabiskan triliunan rupiah untuk KTP elektronik dan ada chip teknologi, revolusi industri 4.0, ada digital ekonomi di belakang KTP kita," ucapnya.

Meski konsep *single identity number* belum sepenuhnya sempurna, Sandiaga yakin hal itu akan dapat diatasi. Ia mengatakan, Indonesia memiliki banyak anak-anak muda yang mampu berinovasi dalam bidang teknologi. "Dengan terobosan inovasi, dengan pendekatan digital sangat mudah dilakukan. Kita punya programmer-programmer canggih. Kita punya anak-anak muda yang memiliki kemampuan khusus untuk teknologi digital ini. Jadi itu harapan kita," tutur Sandiaga.

Lampiran berita 6

Jokowi: Tidak Setuju? Orang Ini Program Bagus Kok...

Calon presiden petahana Joko Widodo heran mengapa ada pihak yang tidak setuju terhadap program tiga kartu barunya. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam acara kampanye terbuka perdana di Stadion Yusuf Maulana, Kota Serang, Banten, Minggu (24/3/2019) sore.

"Ada yang tidak setuju? Kalau ada, maju ke depan sini, saya berikan sepeda," ujar Jokowi disambut tepuk tangan dan keriuhan. orang ini program bagus, kok tidak setuju," lanjut dia. Tiga kartu program baru Jokowi itu, yaitu Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Prakerja. Jokowi menjelaskan, melalui KIP Kuliah, anak miskin yang berniat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

KIP Kuliah ini menyempurnakan KIP yang selama 4,5 tahun terakhir telah dibagikan kepada 13 juta penerima tingkat SD, SMP dan SMA. Sementara, Kartu Sembako ke depannya dapat digunakan khusus untuk ibu-ibu untuk mendapatkan diskon sembilan bahan pokok. Adapun, Kartu Prakerja bakal menyasar para lulusan sekolah yang baru mencari pekerjaan dan orang yang hendak berpindah pekerjaan.

Dengan kartu ini, saudara-saudara akan dilatih di BUMN, kementerian, BLK, baik di dalam maupun luar negeri. Ini akan kita lakukan besar-besaran di tahun depan," ujar Jokowi. Ia juga memastikan, pemegang kartu itu akan mendapatkan insentif selama maksimal 1 tahun apabila belum mendapatkan pekerjaan.

Lampiran berita 7

Jokowi: Tiga Kartu Baru Berdasarkan Survei, Bukan Awur-awuran

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut tiga kartu baru yang akan diluncurkannya jika memenangi Pilpres 2019 muncul berdasarkan survei kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, berdasarkan hasil survei, kebutuhan utama rakyat berturut-turut ialah harga sembako, pekerjaan, dan pendidikan. Oleh karena itu, Jokowi meluncurkan tiga kartu baru, yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. "Jadi ketiga kartu ini kita keluarkan berdasarkan survei. Jadi bukan awur-awuran," kata Jokowi yang saat bertemu pengurus dan anggota pengurus dan anggota Tim Kampanye Daerah (TKD) Sulawesi Tenggara, di Kendari, Sabtu (2/3/2019).

Dengan Kartu Prakerja, lulusan SMA atau SMK, perguruan tinggi, serta korban PHK akan mendapat pelatihan untuk memasuki industri serta mendapat uang saku dalam jangka waktu tertentu. Kartu Indonesia Pintar Kuliah memungkinkan anak-anak Indonesia dari keluarga tidak mampu bisa menempuh ilmu di perguruan tinggi.

Adapun Kartu Sembako akan membuat warga mendapat diskon saat membeli kebutuhan pokok. Jokowi meminta tim suksesnya di Sulawesi Tenggara membantu menyosialisasikan ketiga kartu tersebut. "Saya berikan tiga senjata ini untuk menjelaskan ke masyarakat apa yang akan kita kerjakan ke depan," kata Jokowi disambut sorak-sorai pendukungnya.

Lampiran berita 8

Ketua DPR: Program Kartu Jokowi Harus Diapresiasi, Bukan Malah Nyinyir

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan, program baru Presiden RI Joko Widodo seperti Kartu Pra-kerja, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, dan Kartu Sembako Murah harus diapresiasi. Bambang menilai, program tersebut merupakan terobosan baru. "Terobosan itu sudah banyak dilakukan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako Murah, kemudian terobosan kartu kesehatan, dan sekarang kartu untuk tenaga kerja. Menurut saya, ini justru kita harus memberikan apresiasi," ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Bambang juga menanggapi adanya pandangan bahwa salah satu program baru Jokowi, yaitu Kartu Pra-kerja, tidak ideal dengan kondisi finansial negara. Sebab Jokowi akan menggaji pemegang kartu tersebut meski belum mendapat pekerjaan. Bambang mengatakan, justru ini adalah tugas negara untuk mencari anggarannya. Negara wajib memenuhi. "Jadi bukan soal ada duitnya atau tidak, tetapi justru kewajiban negara mencari sumber-sumber pendapatan negara untuk memenuhi kewajiban negara kepada rakyatnya. Itu dijamin dalam konstitusi," ujar Bambang.

Bambang juga tidak mempermasalahkan Jokowi yang baru mengeluarkan program ini menjelang pemilu 2019. Menurut dia, semua pemerintah memiliki proses masing-masing. Pada awal pemerintahan, Bambang menilai, Jokowi fokus memperjuangkan KIP dan KIS. Setelah berhasil diterapkan, bukan hal aneh jika Jokowi mengembangkannya dalam bentuk kartu lain. "Itulah terobosan yang dilakukan oleh Presiden. Harusnya kita memberikan apresiasi, bukan malah nyinyir," kata dia.

Lmapiran berita 9

Pengamat: Kartu Pra-Kerja Jokowi Konkret, Sementara Gagasan Prabowo Tak Sentuh Bumi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebutkan, program Kartu Pra-Kerja Joko Widodo merupakan gagasan yang konkret. Meskipun nanti perlu dipikirkan soal pendanannya, namun jangan mencibir program Jokowi itu tanpa memberikan solusi. "Logika jangan semua yang disampaikan petahana itu buruk. Pola pikirnya jangan hitam dan putih. Menurut saya, kalau program kerja ini dianggap enggak realistis, mestinya dijawab dengan program kerja yang menurut (kubu paslon) 02 realistis," kata Adi, di Jakarta, Sabtu (9/3/2019), seperti dikutip Antara. Pernyataan Adi ini menyikapi kritik dari sejumlah kalangan perihal mustahilnya program ini diterapkan.

Politisi PKS Fahri Hamzah, misalnya, menyebut Kartu Pra-Kerja tidak masuk akal karena menurut dia tidak ada dana untuk untuk membiayai program ini. Waketum Gerindra Fadli Zon bahkan menyebut Kartu Pra-Kerja ini impian kosong, politis, dan norak. Adi menyarankan kepada pendukung pasangan Prabowo-Sandi selaku penantang untuk menjawab Kartu Pra-Kerja dengan program serupa yang dianggap lebih masuk akal untuk memfasilitasi kelompok lulusan SMA dan SMK dalam mengakses pekerjaan. "Bukan hanya mengatakan itu program tidak rasional, enggak ada dananya, kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Ini kan, menurut saya, cara-cara yang ingin menyederhanakan sesuatu dengan lapor melapor.

Mestinya Ini dilawan dengan program lain yang rasional," imbuh Adi. Dia juga mengkritisi cara-cara pasangan calon Prabowo-Sandi memberikan solusi permasalahan, yang hanya terfokus pada 100 hari kerja. Menurut Adi, dalam menjawab program kerja petahana idealnya kubu penantang bisa menyuguhkan gagasan yang lebih brilian dan rasional dalam mempermudah akses pendidikan, mengatasi lonjakan calon-calon tenaga kerja, dan mahalannya harga-harga bahan pokok.

Kendati demikian, Adi sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa pendanaan dari program ini tetap harus dipikirkan secara matang dan terukur. "Isu dari mana (uangnya) itu memang perlu dijawab. Apakah akan diambil dari pengetatan dana Badan dan Kementerian, pajak, atau nambah

utang sekalipun itu enggak soal selama itu untuk kebaikan rakyat miskin," ujarnya. "Selama itu untuk kebaikan anak-anak muda kita supaya bisa memiliki pekerjaan. Jangan sampai sirkulasi keuangan ini hanya berputar pada kelompok-kelompok menengah tertentu," tambah Adi.

Selama ini masyarakat juga tidak pernah membayangkan pembangunan infrastruktur yang jor-joran itu ada uangnya, bahkan dananya dari mana enggak jelas, tapi dalam praktiknya infrastruktur jelas. "Banyak lubang untuk mengeluarkan dana. Misalnya, dari pengetatan dana pengeluaran kementerian. Artinya semua kementerian itu dipaksa mengencangkan ikat pinggang biar dananya dialokasikan untuk infrastruktur. Itu kan salah satu upaya. Dulu infrastruktur juga dicibir dianggap gak realistis, duitnya gak ada. Buktinya ada. Setelah dana-dana BUMN, dana pajak juga diambil," tuturnya.

Adi mengatakan, cita-cita dari program ini besar agar anak-anak muda tidak jadi pengangguran dan lulusan-lulusan SMA dan SMK punya "skill" di bidang usaha dan pekerjaan. "Apa itu salah? Semua diawali dari ide," ucapnya. Adi tidak menampik jika program ini akan memiliki insentif elektoral untuk Jokowi, sekaligus mengesankan kubu 02 panik dengan kartu prakerja ini. "Tentu (berpengaruh). Karena ini program populis dan visi misi Jokowi dari tiga kartu ini lebih detail. Artinya ketika ditanya bagaimana ibu-ibu bisa mengakses barang mudah, jawabannya ya sederhana dikasih kartu sembako murah, ketika ditanya anak muda bisa kerja, dikasih keterampilan lalu disubsidi," ujar Adi.

Menurut Adi, hal itu lebih kongkret daripada jawaban kubu Prabowo-Sandi yang selalu bersifat umum dengan jawaban 100 hari kerja. "Prabowo sebenarnya semangatnya sama ingin membantu rakyat, tapi jawabannya semua akan diselesaikan dalam program 100 hari. Tidak ada basis argumentasi yang detail. Prabowo selalu berlindung di bawah narasi besar, tapi gagasan yang menyentuh bumi enggak ada. Lebih banyak retorika besarnya, tapi gagasan operasionalnya kering," kata Adi Prayitno.

Lampiran berita 10

Janji Program Kerja Prabowo-Sandiaga, dari Persoalan Ekonomi, Susu Gratis hingga Ancaman Persekusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan visi misi andalannya terkait Pilpres 2019. Visi misi tersebut ia paparkan saay menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk 'Indonesia Menang' di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019) malam.

Dalam pidatonya, Prabowo menjabarkan lima fokus program kerja nasional bersama calon wakil presiden Sandiaga Uno jika keduanya terpilih. Kelima fokus program kerja itu kemudian ia jabarkan lagi melalui sejumlah janji-janji politik, dari soal penciptaan lapangan kerja, penyediaan susu gratis hingga penghentian ancaman persekusi terhadap kelompok minoritas.

Berikut lima fokus program kerja nasional pasangan Prabowo-Sandiaga:

Fokus pertama: Ekonomi yang mengutamakan rakyat, adil, makmur, berkualitas dan berwawasan lingkungan

1. Menciptakan lapangan kerja untuk rakyat
2. Memastikan BUMN kuat dan tidak merugi
3. Pemberdayaan dan pemberian insentif kepada Usaha Menengah dan Kecil
4. Memastikan utang tidak membengkak
5. Mengubah jutaan hektar hutan yang sudah rusak jadi hutan produktif untuk produksi pangan, energi dan air bersih
6. Pendirian bank tani dan nelayan
7. Kepastian hukum untuk para pengemudi ojek online, taksi, bis dan penentuan tarif minimal yang menguntungkan pekerja dan pengusaha
8. Perbaikan penghasilan prajurit TNI, polisi, hakim dan jaksa yang bertugas di daerah terpencil.

Fokus kedua: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial

1. Perbaikan gaji guru honorer dan tenaga kesehatan
2. Perbaikan tata kelola BPJS dan jaminan sosial lainnya
3. Memperkuat program Keluarga Berencana
4. Penyediaan susu gratis bagi anak sekolah

5. Pembangunan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas
6. Perbaikan kualitas sekolah, universitas hingga pondok pesantren dan madrasah
7. Membangun Lembaga Tabung Haji
8. Negosiasi dengan Arab Saudi untuk membangun gedung milik Indonesia untuk mengurangi biaya naik haji.

Fokus ketiga: Memastikan keadilan hukum dan menjalankan demokrasi yang berkualitas

1. Menjamin kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan pers
2. Menghentikan ancaman persekusi terhadap individu, organisasi dan insan pers yang berseberangan pendapat dengan pemerintah
3. Membebaskan dari ancaman kriminalisasi
4. Memastikan tidak ada organisasi yang terstigma dan dihakimi tanpa proses pengadilan
5. Penegakan hukum yang tidak tebang pilih
6. Memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman
7. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dari pusat hingga daerah.

Fokus keempat: Menjadikan Indonesia rumah yang aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Memastikan TNI menjadi angkatan pertahanan yang kuat dan bertaraf dunia
2. Meningkatkan kemampuan kepolisian dalam mengantisipasi dan mengatasi bentuk kejahatan baru
3. Meningkatkan kemampuan negara dalam melakukan pencegahan, deteksi dini, penanganan cepat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kasus-kasus bencana alam.

Fokus kelima: Penguatan karakter dan kepribadian bangsa: Melakukan proses pembangunan karakter.

Lampiran berita 11

Alasan Tim Prabowo-Sandiaga Gunakan Kata "Menyelamatkan Indonesia" di Visi Misi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno sudah memasukkan dokumen visi misinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dirilis ke publik melalui situsweb KPU. Pasangan calon nomor urut dua itu menjabarkan visi misinya dalam 4 pilar besar.

Salah satu yang menjadi fokus pasangan ini adalah pilar bidang ekonomi. Dalam salah satu butir pilar ekonomi tersebut, Prabowo-Sandiaga menilai perlunya penyelamatan Indonesia di bidang ekonomi. Bunyi lengkap butir ini adalah "Menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan di bidang ekonomi, dengan mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan mampu bersaing di tingkat dunia".

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo mengatakan, penggunaan kata "Menyelamatkan Indonesia" di butir pilar ekonomi bukan tanpa alasan. "Butir tersebut dasar pertimbangannya adalah, Indonesia tidak boleh lagi hanya mengandalkan kekayaan alam sebagai tulang punggung ekonomi," ujar Dradjad kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (12/10/2018).

Dradjad yang juga Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini terlalu mudah digoyang oleh faktor eksternal karena rapuhnya sumber-sumber pertumbuhan domestik. Ia mencontohkan, industri yang terlalu bertumpu pada industri primer, ekspor terlalu mengandalkan komoditas, dan dominansi impor dalam proses produksi dan konsumsi terlalu tinggi. Sementara, sumber daya manusia dinilai belum menjadi sumber kekuatan ekonomi. "Jadi ada kelemahan mendasar yang membuat ekonomi mudah goyang seperti sekarang," kata dia.

Menurut Dradjad, Prabowo-Sandiaga akan menjadikan kondisi ekonomi tersebut sebagai fokus dalam visi misinya. Pengembangan sumber daya manusia akan dijadikan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Inovasi dan kreativitas, kata Dradjad, akan menjadi motor, baik untuk sektor seperti pengolahan hasil pertanian hingga ke sektor modern seperti ekonomi digital dan pengembangan IT.

Inovasi dan kreativitas bisa menghasilkan para usahawan muda. Ia menyebutkan, di Italia, para usahawan muda mampu mengolah limbah hasil pertanian seperti jeruk menjadi tekstil untuk industri fashion di negara tersebut. Di AS dan Eropa Barat, para pengusaha muda bisa menghasilkan outlet ritel kopi dengan nama-nama besar. Di Singapura, muncul para traders muda. Sementara, di Indonesia, inovasi dan kreativitas itu bisa menghasilkan orang seperti CEO Go-jek Nadiem Makarim. "Sayangnya, Nadiem ini adalah hasil inisiatif individual. Negara kurang atau bahkan tidak hadir dalam menyiapkan 'pemenang' seperti Nadiem," ujar Dradjad. "Inilah salah satu pilar kebijakan ekonomi Prabowo-Sandi. Rinciannya banyak. Tapi bahasa gampang, negara harus pro-aktif dan menginvestasikan dana APBN yang memadai untuk menghasilkan lebih banyak lagi Nadiem baru," lanjut dia.

Lampiran berita 12

Timses Sebut Prabowo-Sandi Janji Alokasikan 10 Persen Dana Pendidikan untuk Kompetisi Antar-sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen untuk menghidupkan kompetisi siswa antar-sekolah jika terpilih pada Pilpres 2019. Dahnil mengatakan, 10 persen dari dana pendidikan dalam anggaran negara akan difokuskan untuk menggelar kompetisi, mulai dari bidang ilmu pengetahuan hingga olahraga. "Kita berkomitmen, 10 persen dari dana pendidikan itu difokuskan pada menghidupkan semangat kompetisi. Semua jenis kompetisi mulai dari sains sampai dengan olahraga," ujar Dahnil dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

Terkait dengan isu kesehatan, kata Dahnil, Prabowo-Sandiaga berencana menggelar kompetisi olahraga setiap tahunnya. Sementara di banyak negara maju, liga sekolah telah menjadi laboratorium untuk mencari atlet-atlet berbakat di berbagai cabang olahraga. "Kalau di beberapa negara maju, liga-liga sekolah itu menjadi laboratorium utama para atlet-atlet hebat. Atlet-atlet basket itu lahir dari liga-liga sekolah dan liga-liga kampus," tutur Dahnil.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan kompetisi tersebut nantinya akan mensinergikan antar-kementerian, misalnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Olahraga, dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, kompetisi akan menjadi tradisi antarsekolah dan kampus yang bergulir setiap tahun. "Semuanya saling terkait untuk menghidupkan tradisi kompetisi ini. Kompetisi sepakbola antar sekolah, antar kampus, itu harus hidup setiap tahun. Terus bergulir, harus hidup," kata Dahnil. "Dana pendidikan itu minimal 10 persen itu harus digunakan untuk kompetisi-kompetisi seperti ini," ucap mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Lampiran berita 13

Solusi Masalah Rokok, Prabowo-Sandi Akan Dorong Petani Tembakau Beralih Profesi

Badan Pemenangan Nasional (BPN) menyebut, program pengendalian produksi tembakau akan menjadi perhatian dalam debat ketiga Pilpres 2019. Anggota tim kesehatan BPN, Hermawan Saputra, mengungkapkan, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan memberikan solusi agar pengguna rokok di Indonesia bisa menurun. Menurut dia, yang perlu dibereskan adalah hulu masalah industri rokok, yaitu mendorong petani tembakau untuk beralih profesi di bidang lain.

"Kita naikkan cukai pun, tapi selama budaya dan perilaku masyarakat merokok tidak berubah serta petani yang menggantungkan diri di tembakau, ya tidak akan selesai," ujar Hermawan saat ditemui dalam sebuah diskusi bertajuk "Menakar Visi Kesehatan" menuju debat ketiga Pilpres 2019 di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019). Maka dari itu, lanjut Hermawan, yang perlu dibenahi adalah alternatif dan sumber kesejahteraan petani tembakau.

Dia menyebutkan, jika Prabowo-Sandiaga terpilih, petani tembakau akan didorong beralih ke industri lain dengan menambah anggaran untuk industri tertentu, misalnya ekonomi kreatif. "Anggaran untuk industri ekonomi kreatif akan kami tambahkan. Maka, petani dengan sendirinya akan mudah teralihkan dari yang awalnya menjadi petani tembakau ke industri kreatif," ungkapnya.

Meskipun tidak mudah, Hermawan meyakini Prabowo-Sandiaga memiliki kemauan politik yang kuat agar jumlah pengguna rokok bisa menurun. Dia mengatakan, tim kesehatan BPN sudah membuat rencana dan merancang program kesehatan yang bisa dipaparkan Sandiaga saat debat ketiga. Adapun tema debat ketiga ialah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

Lampiran berita 14

Prabowo: Katanya Pemilu Jujur, tapi Belum Mulai Sudah Nyoblos Sendiri

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung kasus surat suara tercoblos di Malaysia untuk pasangan rivalnya, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Katanya pemilu jujur, bersih, adil, tapi belum mulai saja udah ada yang nyoblos nyoblos sendiri," kata Prabowo saat menghadiri deklarasi dukungan dari Aliansi Advokat Indonesia Bersatu di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Prabowo menyesalkan terjadinya dugaan kecurangan ini. Ia menilai pemilu yang tidak jujur adalah bentuk pelanggaran dan penggunaan terhadap kehendak rakyat. Ia pun mengibaratkan kecurangan ini layaknya permainan sepak bola.

"Manusia tidak suka dibohongi, tidak suka dicurangi. Ibarat main sepak bola kita lihat wasit tidak netral, memihak satu kesebelasan, hakim garis demikian, semua aturan dilanggar. Kita mau enggak ikut main dalam pertandingan seperti itu?" kata Prabowo. "Manusia yang normal tidak mau dan saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia manusia yang normal. Manusia yang punya akal sehat.

Prabowo mengingatkan bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah pintar. Rakyat tidak mau terus dibohongi dan dicurangi. "Walau pun miskin tapi rakyat Indonesia punya harga diri," sambung Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Dalam acara yang sama, pimpinan aliansi Advokat Indonesia Bersatu Otto Hasibuan menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya siap melawan secara hukum apabila ada kecurangan. "Lakukan langkah hukum jika ada kecurangan. Hari ini kita lihat, di Malaysia ada kecurangan, sangat menyedihkan," kata dia. Sebelumnya, beredar video amatir yang menunjukkan temuan surat suara sudah tercoblos. Surat suara itu disebut dimuat dalam puluhan kantong. Diduga, hal ini terjadi di Selangor, Malaysia. Informasi dalam video tersebut, surat suara tercoblos untuk caleg Partai Nasdem. Sementara surat suara Pilpres, tercoblos untuk pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Lampiran berita 15

Kubu Prabowo-Sandiaga Nilai Wajar jika Masyarakat Ragukan Kredibilitas KPU

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Yandri Susanto menilai wajar jika ada sebagian masyarakat yang khawatir mengenai rendahnya profesionalitas atau kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Yandri memandang fenomena tersebut sebagai bentuk kepedulian sekaligus kontrol dari masyarakat agar penyelenggara pemilu dapat bersikap netral. "Nah kekhawatiran-kekhawatiran itu sih menurut saya wajar-wajar saja. Sehingga kontrol masyarakat itu kan berjalan," ujar Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Yandri menuturkan, kekhawatiran masyarakat terkait kredibilitas KPU menjadi wajar jika melihat dari berbagai persoalan yang muncul belakangan ini. Ia menyinggung masalah dugaan data tidak wajar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPT_{hp}) yang dirilis KPU 15 Desember 2018.

Kemudian politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyinggung masalah 103 warga negara asing yang memiliki e-KTP dan masuk DPT. "Jadi kalau hari ini ada sebagian masyarakat yang meragukan kredibilitas KPU, ya enggak apa-apa, terima saja, itu bagian dari kontrol," kata Yandri. "Tdk perlu juga merasa tersudutkan, merasa terdegradasi atau tidak legitimate lagi, enggak perlu. Dia (KPU) tetap fokus saja dengan kerja-kerja riilnya. Sehingga masyarakat diperlihatkan kepada publik ya memang KPU profesional," tutur dia.

Lampiran berita 16

KPU Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal 17,5 Juta Data Pemilih Tak Wajar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) soal 17,5 juta data tak wajar dan 775.000 data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. KPU mengakui, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu. Para pemilih tersebut kebanyakan lahir di bulan Januari, Juli, dan Desember. Data tersebut mengacu pada data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu disebabkan warga lupa tanggal lahirnya saat pencatatan proses administrasi Dukcapil. "Data dengan tanggal lahir tersebut demikian adanya. Mengapa data seperti itu bisa muncul? Informasi yang kami terima, data itu hasil dari pencatatan di bawah," kata komisioner KPU, Viryan Azis, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

"Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa. Hal-hal seperti itu kemudian disamakan tanggal lahirnya, ada yang tanggal 1 bulan 7, tanggal 1 bulan 12, dan tanggal 1 bulan 1," katanya. Menurut Viryan, data tersebut sudah ada sejak Pemilu 2014. Ia membantah jika data ini disebut sebagai data tidak wajar.

"Ini bukan data tidak wajar, melainkan data yang secara administrasi kependudukan demikian adanya," ujarnya. Viryan menyarankan BPN untuk mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil karena data kependudukan dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Sementara itu, mengenai dugaan 775.000 data ganda yang disampaikan BPN, Viryan menyebut bahwa potensi data ganda itu sudah disampaikan KPU ke BPN pada Februari. Ia mengatakan, sejak September 2018 pihaknya terus berkoordinasi dengan Partai Gerindra untuk menyerahkan pembaruan jumlah potensi data ganda. Potensi data ganda itu saat ini tengah diklarifikasi oleh jajaran KPU daerah. "Selama kami temukan itu ganda, pasti kami akan coret, sama seperti data WNA, orang meninggal, itu satu kelompok. Kami menyebutnya perbaikan DPT," kata Viryan.

BPN Prabowo-Sandiaga menemukan 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Data tersebut didapat BPN dari hasil pencermatan mereka terhadap DPT hasil perbaikan II (DPT_{hp}) yang dirilis KPU 15 Desember 2018. "Kami temukan ya, ada yang enggak wajar itu 17,5 juta (data) itu, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," kata juru kampanye BPN, Ahmad Riza Patria, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). Tak hanya itu, BPN juga menemukan ada 775.248 data ganda dalam DPT Pemilu 2019.

Lampiran berita 17

Kemendagri Bantah BPN Prabowo-Sandiaga soal DPT Tak Wajar, Ini Penjelasan

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh angkat bicara mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang disebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, banyak yang tidak wajar. Ketidakwajaran itu, menurut BPN, lantaran ada jutaan nama yang memiliki tanggal lahir sama, yakni 31 Desember. Bahkan, ada ratusan ribu nama yang berusia di atas 90 tahun. Temuan ini dianggap janggal oleh BPN Prabowo-Sandiaga. Namun, menurut Zudan, temuan itu justru merupakan sesuatu yang wajar. "Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember sudah berlangsung lama, semenjak Kemendagri menggunakan SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan)," ujar Zudan melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Ketika Dukcapil Kemendagri menggunakan SIMDUK, sebelum tahun 2004, seluruh penduduk di Indonesia yang lupa atau tidak tahu akan tanggal lahirnya, akan dituliskan lahir pada tanggal 31 Desember pada kartu identitasnya. Kemudian, pada 2004, Dukcapil menggunakan (SIAK) Sistem Informasi Kependudukan dalam pengelolaan data base warga negara Indonesia. Sejak menggunakan SIAK, warga negara yang tak mengetahui atau lupa akan tanggal lahirnya, akan ditulis lahir pada 1 Juli.

"Bila dia tidak ingat tanggal, tapi ingat bulannya, maka ditulis tanggal 15 dengan bulan lahir yang dia ingat," papar Zudan. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat kembali menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. "Dengan demikian, kita sekarang bisa mengetahui mengapa banyak orang Indonesia bertanggal lahir 1 Juli, 31 Desember atau tanggal 15 ya," ujar Zudan.

Diberitakan, sejumlah petinggi BPN Prabowo-Sandiaga mendatangi kantor KPU, Senin siang. Kehadiran mereka itu untuk mempertanyakan dugaan data tidak wajar dalam DPT Pemilu 2019. Menurut hasil pencermatan tim IT BPN, ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang diduga tak wajar. Pencermatan dilakukan tim BPN berdasar DPT hasil perbaikan II (DPT_{hp}) yang dirilis KPU

15 Desember 2018. "Kami temukan ya, ada yang enggak wajar itu 17,5 juta (data) itu, di antaranya bertanggal lahir 1 Juli (jumlahnya) 9,8 juta (pemilih). Ada yang lahir 31 Desember (jumlahnya) 3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari (jumlahnya) 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar," kata Juru Kampanye BPN, Ahmad Riza Patria, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin. "Karena menurut grafik yang lain-lain itu kurang lebih berkisar 400-500 ribu. Ini ada lompatan yang luar biasa sampai 10 kali, bahkan 20 kali," sambung dia.

Cara Kampanye Jokowi Patut Ditiru di Pemilu 2014

JAKARTA. KOMPAS.com — Cara berkampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, dianggap telah memberikan warga contoh baru dalam menjaring suara calon pemilih. Cara jitu ini layak diikuti oleh kalangan elite partai politik atau calon presiden dalam Pemilihan Umum 2014.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, cara kampanye dari Jokowi dan Basuki atau Ahok itu telah menjadi kunci kemenangan kandidat yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut. Cara kampanye itu berbeda dari cara-cara dari figur ataupun elite partai politik sebelumnya. "Cara berkampanye Jokowi-Ahok itu efektif. Dia tidak mengumpulkan orang, tapi datang orang. Kampanye jemput bola yang tentu menghemat biaya," ujar Jeirry di Maarif Institute, Jakarta, Senin (24/9/2012).

Jeirry menjelaskan, kampanye yang biasa dilakukan figur atau elite parpol dengan cara mengumpulkan orang di lapangan terbukti tidak efektif dalam menarik suara pemilih. Hal tersebut disebabkan adanya jarak antara pemilih dan figur yang akan dipilihnya. Selain itu, masyarakat Indonesia telah jenuh dengan cara kampanye di lapangan yang teramat monoton. Pola kampanye di lapangan itu, menurut Jeirry, dapat dibuat pola, yaitu menyewa lapangan, mengumpulkan massa, mendatangkan public figure, menyampaikan visi-misi, kemudian pulang.

Cara tersebut tidak efektif dalam menyampaikan program kerja, visi, dan misi sebab jarak yang dibangun antara pemilih dan yang dipilih searah sehingga tidak memungkinkan timbulnya hubungan timbal balik atau dialektika yang dapat memberikan solusi alternatif terhadap beragam permasalahan pemilih. "Yang dilakukan Jokowi-Ahok tidak begitu. Mereka berdua tidak menggelar kampanye massal. Mereka masuk gang, keluar gang, lalu menyapa masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka. Itu kampanye yang efektif dan layak dicontoh," ujarnya. Ia mengatakan, kampanye cara Jokowi dan Basuki tersebut tentunya akan sangat menyerap tenaga. Namun, jika figur

serius untuk membawa angin perubahan bagi masyarakat, kampanye tersebut tentunya tidak menjadi kendala yang berarti.

Dalam konteks Pemilu 2014, baik badan legislatif maupun presiden, calon yang serius tersebut setidaknya pada waktu dekat telah mengambil an-cang-ancang untuk menerapkan cara Jokowi-Basuki dengan berkeliling Indonesia. "Kampanye model itu murah, biayanya hanya modal pesawat doang, lalu jalan mendatangi masyarakat di seluruh Indonesia. Yang terpenting, kan, masyarakat mengenal figur siapa yang akan dipilihnya secara langsung, bukan lewat baliho atau foto," kata Jeirry.

Dalam kampanyenya, Jokowi-Basuki tidak menghendaki pemasangan spanduk atau baliho di tempat-tempat keramaian. Pasangan nomor urut ketiga itu juga didukung oleh gerakan relawan dan publikasi melalui media sosial di internet. Berdasarkan proses hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, Jokowi dan Basuki unggul dalam perolehan suara Pilkada DKI Jakarta 2012. Dalam hitung cepat Litbang Kompas, mereka meraih 52,97 persen suara sah di 200 sampel tempat pemungutan suara. Adapun pesaingnya, Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli, yang didukung oleh banyak partai politik, hanya meraih 47,03 persen suara sah.

Lampiran berita 19

Jokowi dan "Personality Politics" Penentu Pemilu Presiden 2014

SINGAPURA, KOMPAS.com — Kepribadian kandidat dinilai bakal menjadi penentu dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia. Kondisi itu dikenal sebagai *personality politics*. "Sosok yang paling berkhayala (dan) mampu menggugah perhatian warga yang akan terpilih," kata *Associate Professor* Leonard Sebastian,

Direktur Program Studi Indonesia di *Rajaratnam School of International Studies*, Singapura, akhir pekan lalu. Sebastian mengatakan, pemilu Indonesia tidak ditentukan oleh ideologi ataupun platform partai politik. Contoh *personality politics* yang berlangsung di Indonesia, sebut dia, adalah melejitnya popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sosok Jokowi dengan kegiatan blusukan-nya, kata Sebastian, mampu menggugah warga, terutama dari kalangan miskin yang tinggal di kawasan kumuh. Jokowi digambarkan sebagai sosok yang merakyat dan tak elitis. Bisnis Jokowi pun diyakini publik dibangun dari bawah sehingga tahu rasa hidup susah.

Sebastian mengatakan, kinerja Jokowi dalam satu tahun terakhir memimpin Jakarta juga terlihat lebih sukses dibandingkan kinerja lima tahun pendahulunya, Fauzi Bowo. Tantangan PDI-P Namun, Sebastian menyebutkan pula satu pertanyaan besar yang akan muncul bila Jokowi ternyata tak menjadi calon presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sekalipun tetap maju dalam Pemilu Presiden 2014.

"Pertanyaannya adalah apakah kepribadian Jokowi akan tetap mampu mendulang suara jika (hanya) dicalonkan menjadi wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri," papar profesor dari Australian National University ini. Sampai saat ini belum ada sinyal nyata dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang calon yang akan mereka usung dalam Pemilu Presiden 2014.

Siapa pun calon yang diusung partai ini, kata Sebastian, penantang mereka adalah Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie. Prabowo, papar Sebastian, adalah tokoh populer di pedesaan. Karakter Prabowo juga dikenal tegas, imbuh dia, menjadi antitesis dari figur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun figur Aburizal, Sebastian menilainya punya kekurangan dari sisi kharisma dan star power. Menurut Sebastian, stigma Prabowo sebagai pelanggar HAM tidak akan punya pengaruh signifikan. "Prabowo sudah membangun citranya sejak 2009 dan masyarakat mengenalnya, faktor yang sangat penting," ujar dia.

Sementara itu, Partai Demokrat diperkirakan hanya akan memperoleh suara sekitar 10 persen. Bisa maju atau tidaknya kandidat hasil konvensi calon presiden yang digelar partai itu, menurut dia, akan tergantung pada tawar-menawar politik Partai Demokrat dengan koalisinya. Dari semua peserta konvensi, Sebastian menyebut mantan KSAD, Pramono Edhie Wibowo, dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan sebagai kandidat yang paling berpeluang memenangi proses seleksi internal tersebut.

Tanpa Jokowi, 2014 Bukan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, tidak ada tokoh dan politisi yang dapat menandingi popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi. Dia menyatakan, tanpa Jokowi sebagai peserta Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, perhelatan demokrasi itu tidak dapat disebut pemilu. “2014 tanpa Jokowi, bukan pemilu,” ujar Boni dalam diskusi bertajuk “Memilih Capres Secara Rasional” di Jakarta, Sabtu (14/9/2013).

Ia mengatakan, jika Jokowi atau PDI-P sudah mendeklarasikan pencapresan mantan Wali Kota Surakarta itu, maka keriuhan politik Indonesia hanya pada pusaran pencarian calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Jokowi. Dia menilai, Jokowi paling tepat dijagokan menjadi capres. “Karena tidak ada yang bisa menandingi Jokowi,” tutur Boni. Dia bahkan mengilustrasikan, panggung politik Indonesia 2014 bak pertunjukan musik. Dalam pertunjukan tersebut, menurutnya, Jokowi memegang peran sentral sebagai vokalis yang paling mendapat perhatian publik. “Jadi kita hanya perlu mencari penyanyi latar. Yang lain-lain, peserta konvensi itu menjadi penari latarnya,” seloroh Boni yang langsung disambut riuh suara peserta diskusi. Ia mengatakan, tingginya keterpilihan Jokowi didorong kejenuhan publik pada kekuasaan lama yang merupakan cermin kelompok elite.

Dia menilai, Jokowi merupakan pemimpin yang muncul dari akar rumput. Sedangkan, capres dan politisi lain, kata dia, merupakan pemimpin yang datang dari kelompok atas. “Jokowi muncul sebagai indikasi matinya elitisme dalam politik. Kematian elitisme karena sinisme publik terhadap kekuasaan lama,” tuturnya. Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Mengingat besarnya antusiasme publik pada Jokowi, Boni menyarankan, PDI-P segera mengumumkan pencapresan Jokowi. Menurutnya, tidak pantas lagi PDI-P memunculkan wajah lama dalam pertandingan politik 2014 nanti.

MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Hatta

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim konstitusi memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK, Kamis (21/8/2014) malam.

Sidang tersebut dimulai pada pukul 14.30 WIB, sementara putusan dibacakan pada pukul 20.45 WIB. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta menerangkan pendapatnya bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014 tidak sah menurut hukum. Alasannya, perolehan suara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU. Tim kuasa hukum Prabowo-Hatta sempat beberapa kali memperbaiki permohonannya.

Dalam perbaikan permohonan setebal 197 halaman yang diserahkan pada Kamis (7/8/2014) siang, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta mendalilkan bahwa Pilpres 2014 cacat hukum dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah perbedaan jumlah nama dalam daftar pemilih tetap (DPT) faktual sebagaimana hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli 2014 dengan SK KPU No 477/Kpts/KPU/13 Juni 2014. Selain itu, Prabowo-Hatta juga menduga bahwa KPU beserta jajarannya melanggar peraturan perundang-undangan terkait pilpres. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; Peraturan KPU Nomor 5, Nomor 18, Nomor 19, dan Nomor 20; serta Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Prabowo-Hatta meminta MK menyatakan batal dan tidak sah terhadap keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Selanjutnya, Prabowo-Hatta juga meminta MK menyatakan

bahwa perolehan suara yang benar adalah yang dicantumkan dalam berkas gugatan, yakni pasangan Prabowo-Hatta dengan 67.139.153 suara, dan pasangan Jokowi-JK dengan 66.435.124 suara.

Dalam persidangan, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta berusaha menghadirkan saksi fakta untuk membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif di sejumlah daerah di Indonesia. Kecurangan tersebut berkaitan dengan jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTB) yang dianggap inkonstitusional, adanya pemilih ganda, dan gagalnya KPU menyelenggarakan pemungutan suara di sejumlah titik di Papua. Meski demikian, tim kuasa hukum KPU berusaha menepis tuduhan itu dengan menghadirkan saksi yang domisilinya disesuaikan dengan keterangan saksi Prabowo-Hatta. Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi-JK menghadirkan saksi yang memperkuat argumentasi KPU. Persidangan berlangsung pada 6-21 Agustus 2014. Sebelum memutuskan, majelis hakim konstitusi telah memeriksa puluhan saksi dan belasan ahli yang dihadirkan semua pihak, pemeriksaan bukti, serta menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara tertutup.

Lampiran berita 22

Pengamat: Tuduhan Prabowo-Hatta soal Pemilu Curang Tak Meyakinkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menilai, tuduhan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi soal adanya pemilu yang curang tidak meyakinkan. Hal itu, kata dia, terlihat dari saksi-saksi yang tidak memiliki data yang kuat tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif. "Selain jumlah kasusnya relatif kecil, kenyataannya, modus dan bukti-bukti atas tuduhan itu juga tidak terlalu meyakinkan," kata Ray di Jakarta, Sabtu (9/8/2014).

Dia mengatakan, dalam kasus di Jawa Timur, saksi yang dihadirkan dalam persidangan belum memuaskan terkait tuduhan adanya penggelembungan suara, pemilih yang tak berhak menggunakan hak pilihnya, atau pengerahan massa yang dilakukan oleh aparaturnegara. "Perdebatan yang diharapkan akan membuka berbagai modus kecurangan pilpres tampaknya tak sepenuhnya akan menuai harapan," ucap dia. Ray pun menyarankan kepada tim Prabowo-Hatta untuk bisa membuktikan lebih lanjut dengan fokus pada adu bukti, bukan adu agitasi. Selain itu, tim Prabowo-Hatta juga sebaiknya menghadirkan saksi-saksi kredibel yang dapat mengubah asumsi menjadi fakta yang meyakinkan. "Bila mereka tidak dapat membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif di suatu daerah, potensi mereka untuk menang akan makin tipis," ucap Ray

Lampiran Berita 23

Halalkan "Serangan Fajar", Prabowo Dianggap Tidak Paham Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyayangkan pernyataan calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto, yang memperbolehkan pendukungnya menerima uang suap untuk mendukung pasangan capres-cawapres tertentu.

Prabowo dinilai telah menghalalkan politik uang yang diharamkan dalam demokrasi. "Bagaimana mungkin yang jelas-jelas dilarang undang-undang itu diperbolehkan. Ini memberi kesan Prabowo tidak mengerti apa makna demokrasi dan makna pemilu dalam negara yang demokratis," ujar Ray di Jakarta, Rabu (11/6/2014).

Ray mengatakan, pemilu dalam negara demokratis membiarkan masyarakat memberi suara kepada orang yang dipilihnya atas dasar rasionalitas, bukan karena uang. Tidak hanya tertuju kepada Prabowo, para pelaku politik uang pun dianggap Ray keliru memahami pentingnya pemilu yang demokratis. "Kalau uang dijadikan sebagai patokan pemilu, tidak perlu ada pemilu yang demokratis. Cukup kontrak saja pakai uang, maka Anda terpilih," ujarnya. Dalam orasinya di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (10/6/2014),

Prabowo meminta pendukungnya untuk menerima uang yang ditawarkan dalam "serangan fajar", tetapi tetap mendukung dirinya dan Hatta Rajasa. Menurut dia, uang yang dibagikan tersebut merupakan uang rakyat. "Masa nolak rezeki. Uang itu yang dia rampok dari negara. Kalau terima ya sopan aja, yang besok coblos nomor satu," kata Prabowo.

Lampiran berita 24

Harian Kompas edisi 20 September 2014

JANGAN REBUT HAK RAKYAT

Pilkada Langsung ke DPRD Bukan Solusi Tepat

Semarang, KOMPAS- Pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai merebut hak politik rakyat. Upaya mengembalikan pilkada langsung menjadi pilkada tak langsung melalui DPRD merupakan gerak mundur dan tidak akan mendapat legitimasi dari rakyat yang menghendaki pilkada langsung.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dalam pidato politik pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, di Semarang, Jawa Tengah. Hadir dalam acara itu ketua umum partai-partai pendukung Joko Widodo- Jusuf Kalla, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad H Wibowo dan Ketua DPP PAN Tjatur Spto Edy, serta pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkali yang dalam pemilu Presiden 2014 mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Megawati menilai, berbagai upaya melalui konsolidasi kekuasaan oleh pihak tertentu untuk mengubah pelaksanaan pemilu langsung harus disikapi secara kritis."Upaya itu nyata-nyata mencoba merebut kedaulatan dari tangan rakyat ke sekelompok elit yang sering kali justru menyalahgunakan kekuasaan," katanya.

Megawati berpendapat, perdebatan akhir-akhir ini terkait RUU Pilkada yang ingin dikembalikan ke pemilihan melalui DPRD merupakan sebuah gerak mundur."Gerak mundur ini dipastikan tidak akan mendapatkan legitimasi dari rakyat karena mencoba mencabut hak politik rakyat," kata Megawati. PDI-P, lanjut Megawati, berketetapan menjaga semangat reformasi. Sangat besar konsekuensinya jika gerak mundur itu di analogikan untuk agenda reformasi lain, yaitu pemilihan Presiden oleh segelintir elite. Megawati menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu langsung di satu sisi, terlihat kemajuan dalam proses demokrasi di Indonesia yang benar-benar menempatkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, khususnya terkait regulasi, ketaatan pada aturan main, berbagai upaya untuk mengatasi belanja pemilu yang bersumber dari APBN atau APBD bagi petahana, dan bermacam kecurangan.